

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu metode yang sah untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan, celah hukum ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menghemat pembayaran pajak, menghindari kewajiban pajak, dan menghindari sanksi administrasi perpajakan. Salah satu strategi untuk mengurangi pembayaran pajak adalah melalui praktik penghindaran pajak, yang mengacu pada usaha legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh individu atau bisnis.¹ Penghindaran pajak ini dapat diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab permasalahan dan keterbatasan pengukuran penghindaran pajak. Yaitu semakin kecil nilai *Cash ETR* menunjukkan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan, dan apabila semakin besar nilai *Cash ETR* menunjukkan semakin kecil pula penghindaran pajak yang dapat dilakukan.²

Penelitian ini fokus pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024, dengan tujuan untuk

¹ T Apriliana and L A Margie, "The Effect Of Company Size, Financial Distress, And Accounting Conservatism On Tax Avoidance," *Journal of Industrial Engineering & Management* ... 5, no. 4 (2024): 95–102, <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/540%0Ahttps://jiemar.org/index.php/jiemar/article/download/540/415>.

² Apriliana and Margie.

memproyeksikan penghindaran pajak menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Diambil 4 perusahaan sebagai contoh representatif untuk menunjukkan fenomena awal terkait variable Tax avoidance, Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Corporate Governance. Berikut ini disajikan pada tabel 1.1 yang diambil dari sebagian data yang mengalami fenomena pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024:

Tabel 1. 1 Data fenomena pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

No	Nama Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i> (CETR)	Ukuran Perusahaan Ln (Total Aset)	<i>Financial Distress</i> (Zmijewski)	<i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional)
1	PT. Arkora Hydro Tbk.	0,135	27,908	-0,701	0,841
2	PT. Barito Renewables Energy Tbk.	0,516	31,745	0,105	0,882
3	PT. Bukaka Teknik Utama Tbk.	0,047	29,637	-2,027	0
4	PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.	-0,115	30,959	0,779	0,921

Sumber: www.idx.com, Laporan keuangan, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1, Perusahaan PT Arkora Hydro Tbk. Nilai *tax avoidance* (CETR = 0,135), Perusahaan mencatatkan rasio pembayaran pajak kas sebesar 13,5%. Angka ini berada lumayan jauh di bawah tarif pajak standar 22%, yang mengindikasikan bahwa manajemen cukup aktif dalam menerapkan strategi efisiensi penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan (Ln total Aset = 27,908), Merupakan perusahaan dengan nilai aset terkecil dalam

sampel ini, menandakan skala operasional yang relatif paling ringkas dibanding tiga perusahaan lainnya. *Financial distress* ($Zmijewski = -0,701$), Nilai *Zmijewski* berada di bawah nol, yang membuktikan bahwa perusahaan memiliki struktur solvabilitas dan likuiditas yang solid sehingga terbebas dari ancaman kebangkrutan. Kepemilikan Institusional (0,841), Mayoritas saham perusahaan (84,1%) dikuasai oleh investor institusi, yang menjamin terselenggaranya fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja manajemen.

Perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk. Nilai *tax avoidance* ($CETR = 0,516$), Nilai $CETR$ mencapai 51,6%, sangat jauh melampaui tarif pajak standar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membayarkan kas pajak dalam jumlah yang relatif besar dibanding laba sebelum pajaknya, sehingga indikasi penghindaran pajak pada perusahaan ini sangat rendah. Ukuran Perusahaan ($\ln \text{ Total Aset} = 31,745$), Memiliki nilai $\ln$ total aset tertinggi dalam fenomena, menempatkan perusahaan sebagai entitas dengan skala bisnis dan basis aset terbesar. *Financial distress* ($Zmijewski = 0,105$), Skor *Zmijewski* bernilai positif (> 0), yang memberikan sinyal awal bahwa perusahaan memiliki kerentanan *finansial* atau potensi mengalami risiko *financial distress*. Kepemilikan Institusional (0,882), Tingkat kepemilikan institusional sangat dominan sebesar 88,2%, yang memperlihatkan tingginya keikutsertaan lembaga keuangan dalam struktur modal perusahaan.

Perusahaan PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Nilai *tax avoidance* ($CETR = 0,047$), Perusahaan mencatatkan nilai $CETR$ yang sangat rendah, yaitu hanya 4,7%. Ini menandakan adanya praktik perencanaan perpajakan yang

sangat agresif guna menekan beban pajak kas perusahaan semaksimal mungkin. Ukuran perusahaan ($\ln \text{ Aset} = 29,637$), Berada pada kategori ukuran menengah dalam kelompok perusahaan. *Financial distress* ($Zmijewski = -2,027$), Memiliki skor *Zmijewski* paling rendah sangat jauh di bawah nol, yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan yang sangat prima dan paling jauh dari risiko kebangkrutan. Kepemilikan institusional (0,000), Tidak memiliki saham yang dikuasai oleh institusi (0%). Kondisi ini menunjukkan absensinya mekanisme pengawasan langsung dari pihak investor institusional.

Perusahaan PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nilai *tax avoidance* ($\text{CETR} = -0,115$), Perusahaan mencatatkan nilai CETR negatif (-11,5%) Fenomena ini mengindikasikan adanya skema perpajakan yang sangat ekstrem, yang dapat dipicu oleh pemanfaatan akumulasi rugi fiskal, restitusi pajak, atau penyesuaian pajak tangguhan yang signifikan. Ukuran perusahaan ($\ln \text{ Aset} = 30,959$) Merupakan entitas dengan skala aset terbesar kedua dalam fenomena. *Financial distress* ($Zmijewski = 0,779$), Memiliki skor *Zmijewski* positif paling tinggi di antara Perusahaan lain, menandakan tingkat potensi *financial distress* yang paling teridentifikasi dan memerlukan perhatian manajemen. Dan kepemilikan institusional (0,921), Mengantongi porsi kepemilikan institusional paling dominan (92,1%), menunjukkan pengawasan eksternal yang terbilang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa semakin semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kuat fungsi

pengawasan terhadap manajemen, sehingga berpotensi menekan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan data fenomena di atas, terlihat adanya ketidaksesuaian antara teori atau konsep umum dengan data empiris: Kepemilikan Institusional vs *tax avoidance*. Secara teori, kepemilikan institusional yang tinggi seharusnya meningkatkan tata kelola dan pengawasan, sehingga menekan praktik efisiensi/penghindaran pajak yang berisiko. Namun, pada PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk., meskipun kepemilikan institusionalnya paling tinggi (92,1%), nilai CETR justru bernilai negatif (-11,5%), yang mengindikasikan praktik perpajakan ekstrem. *Financial distress* vs Tax Avoidance: PT Bukaka Teknik Utama Tbk. berada dalam kondisi sangat sehat ($Zmijewski = -2,027$), namun melakukan penghindaran pajak sangat agresif ($CETR = 4,7\%$). Sebaliknya, PT Barito Renewables Energy Tbk. yang terindikasi mengalami kerentanan finansial ($Zmijewski = 0,105$) justru mencatatkan CETR yang sangat tinggi (51,6%).

Adanya anomali dan ketidakselarasan antara kondisi keuangan, pengawasan institusi, serta tingkat *tax avoidance* tersebut menegaskan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan *corporate governance* kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada sektor infrastruktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Secara konsep teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain adalah strategi bisnis, *corporate governance*,

ketidakpastian lingkungan, ukuran perusahaan, *financial distress*, kapitalisasi tipis, intensitas modal, intensitas persediaan, tanggung jawab social perusahaan, pengalaman perusahaan, ukuran perusahaan, operasional perusahaan, dan struktur modal.³ Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, *financial distress*, dan *corporate governance*.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara lain misalnya dengan menggunakan total aset. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik.⁴ Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks pula aktivitas dan transaksi bisnis yang dilakukan. Kompleksitas transaksi tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.⁵

³ Dianwicakasih Arieftiara, *Tax Avoidance Latent Variable Score (Taxlvs) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm.9.

⁴ Adhitya Sakti Nugraha and Imelda Dian Rahmawati, "Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Good Corporate Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020," *Innovative Technologica: Methodical Research Journal* 3, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i1.14>.

⁵ Diana Sari, "The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019)," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 4 (2021): 860–68, <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.574>.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan terjadinya pembatasan kesulitan keuangan suatu perusahaan sebagai akibat menurunnya kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan, yang dapat meningkatkan bahaya kebangkrutan sehingga perusahaan cenderung menggunakan penghindaran pajak perusahaan untuk mempertahankan usahanya.⁶ *Financial Distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Kesulitan keuangan diawali dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas, dan kewajiban yang tergolong dalam kategori perusahaan.⁷ Semakin tinggi tingkat *financial distress* yang di alami perusahaan maka semakin besar dorongan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk menghemat arus kas dan mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Sebaliknya, jika tingkat *financial distress* semakin rendah maka perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang lebih stabil sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* juga menurun, karena perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengukuran yang digunakan *financial distress* adalah metode *Zmijewski*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate governance*. *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang

⁶ Nawang Kalbuana et al., "CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size on Corporate Tax Avoidance," *Cogent Business and Management* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>.

⁷ Thomas Sumarsan Goh, *Monograf: Financial Distress*, 2023, <https://doi.org/10.1142/S0219024924500110>.

dapat digunakan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan nilai saham untuk jangka panjang dan tetap memperhatikan *stakeholder*.⁸ *Corporate governance* yang baik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Sebaliknya, tata kelola perusahaan yang lemah dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk mengeksploitasi celah-celah perpajakan demi keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Oleh karena itu, semakin kuat penerapan *corporate governance*, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.⁹ Pengukuran yang digunakan *corporate governance* adalah kepemilikan institutional.

Pada penelitian ini, sektor perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan infrastruktur merupakan salah satu badan usaha yang berperan dalam pembangunan dan pengadaan infrastruktur. Perusahaan infrastruktur adalah salah satu perusahaan unggulan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut informasi dari kementerian perhubungan bahwasannya pembangunan infrastruktur harus dilakukan guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Alasan pemilihan Perusahaan Infrastruktur sebagai objek penelitian adalah pertama,

⁸ Kalbuana et al., "CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size on Corporate Tax Avoidance."

⁹ Rony Hermawan and Titik Aryati, "Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2, no. 2 (2022): 381–94, <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14138>.

perusahaan infrastruktur memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi karena mereka menyediakan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik yang sangat mendukung aktivitas ekonomi lainnya.

Selain itu, proyek infrastruktur biasanya memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penelitian pada perusahaan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, karena banyaknya proyek infrastruktur yang didanai atau diatur oleh pemerintah, perusahaan ini menjadi titik temu antara sektor publik dan swasta, sehingga penelitian dapat mengkaji interaksi kebijakan publik dan kinerja perusahaan. Terakhir, sektor infrastruktur sering menjadi fokus investasi besar dari berbagai pihak, sehingga penelitian dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan investasi dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, perusahaan infrastruktur merupakan objek penelitian yang relevan dan penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam bidang ekonomi, manajemen, dan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *financial distress*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *financial distress*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cakupan yang luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar pembahasan lebih terarah, sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah pada Penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen pada Penelitian ini dibatasi pada *tax avoidance* yang diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).
2. Variabel independen yang dianalisis dalam Penelitian ini hanya meliputi ukuran perusahaan, *financial distress*, *corporate governance*. Yang dimana ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) total aset, *Financial distress* diukur menggunakan model *Zmijewski*, Dan *corporate governance* yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi akademis, Sebagai kajian akademis dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distres*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Infrastruktures yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
- b. Bagi Peneliti, Penelitian ini disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distres*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperketat peraturan perpajakan agar celah untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil atau sempit.
- c. Bagi perusahaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan bagi manajemen sebagai penanggungjawab dan agen dalam melindungi pemegang saham. Dan juga dapat memberikan kontribusi praktis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial*

distres, corporate governance terhadap *tax avoidance*. Seperti membantu manajemen perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan yang dipublikasikan ke IDX dengan peraturan dan kebijakan untuk meminimalisirkan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

F. Sistematika Penulisan

Adapun gambaran secara umum sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka menerangkan mengenai pengertian ukuran perusahaan, *financial distress, corporate governance* terhadap *tax avoidance*, kerangka pemikiran dan hipotesis yang memuat jawaban sementara atas masalah.

BAB III: Metode penelitian membahas tentang jenis dan sumber data, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan pengukuran, teknik analisis data.

BAB IV: Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan deskripsi data dan variabel penelitian, hasil pengujian dan pembahasan

BAB V: Merupakan Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.